

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN  
PERIKANAN TANGKAP DALAM PENGEMBANGAN  
EKONOMI NELAYAN DI DESA GOISOOINAN,  
KECAMATAN SIPORA UTARA, KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI**

**Duddy Agus Rosadi Sinaga<sup>1</sup>, Indraddin<sup>2</sup> & Elfitra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister Sosiologi Universitas Andalas, Padang

<sup>2,3</sup>Dosen Magister Sosiologi Universitas Andalas, Padang

Email: duddy@gmail.com

**Abstract**

*The Mentawai Islands District Government seeks to develop capture fisheries by implementing fisheries motorization policies to make fishermen change from fishermen peasants (oriented to meeting their daily needs) to become fishermen post-peasants (using fishing technology in the form of outboard motors or motor boats). This research tries to answer the problems faced in the implementation of capture fisheries development programs in Goisooinan Village, North Sipora District, Mentawai Islands Regency. This study uses a qualitative approach. The researcher used structuration theory from Anthony Giddens which focused on fishermen as agents who had knowledge and awareness of practical awareness, discursive awareness and unconscious motivation caused by the existence of rules and resources that could empower and curb fishermen in taking action. From the results of the study, it was found that the issue of the capture fisheries program was the distribution and utilization of fisheries fishing equipment in the form of 5 pk motorcycles which were not targeted, most fishermen not only used the machine to catch fish but also for other activities such as transporting sand from the sea and going to the fields, the economic structure of an agrarian society, the limitations of fishing gear, the high price of fuel, the limited human resources of fishermen, no assistance and supervision of fishermen, and bad weather conditions.*

**Keywords: Economic Development, Fishermen, Capture Fisheries.**

**A. PENDAHULUAN**

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu dari tiga daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat sehingga pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan percepatan pembangunan khususnya pembangunan perekonomian masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Topografi wilayah Kepulauan Mentawai dikelilingi oleh laut, sehingga daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan dari sektor perikanan.

Pada umumnya nelayan yang ada di Kepulauan Mentawai adalah nelayan tradisional yang memiliki alat tangkap sederhana berupa sampan, pancing dan jaring. Menurut Masyhuri Imron (dalam jurnal Kemiskinan dalam Masyarakat, 2003), bahwa untuk meningkatkan kehidupan nelayan perlu adanya teknologi penangkapan, baik dalam bentuk alat tangkap maupun alat bantu penangkapan (perahu). Nelayan sangat tergantung dengan teknologi penangkapan, karena nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air yang selalu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan mempengaruhi wilayah tangkap atau daya jelajah penangkapan ikan. Dengan alat tangkap yang sederhana, nelayan di Kepulauan Mentawai jangkauan wilayah tangkapnya pun menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan modernisasi alat tangkap ikan di atas, pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai melalui dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai menerapkan program unggulan yaitu sentra kelautan dan perikanan terpadu dan pengembangan perikanan tangkap. Pemerintah berusaha mengembangkan perikanan tangkap dengan menerapkan kebijakan motorisasi penangkapan ikan dalam perikanan untuk menjadikan nelayan berubah dari peasant fisher (berorientasi memenuhi kebutuhan sehari-hari) menjadi post-peasant fisher (menggunakan teknologi penangkapan berupa motor tempel atau kapal motor). Sehingga memberi peluang kepada nelayan menangkap

ikan di perairan yang lebih jauh dan memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak (Arif Satria, 2009:337).

Kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sasaran program ini adalah nelayan tradisional, karena selama ini kelompok nelayan tradisional memiliki kekurangan dan ketidakberdayaan untuk dapat memanfaatkan potensi laut yang melimpah. Melalui program ini, diharapkan akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi nelayan tradisional yang selama ini rentan dengan kemiskinan. Sementara itu potensi sektor kelautan kabupaten Kepulauan Mentawai yang cukup melimpah tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hidup para nelayan.

Kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program pengembangan perikanan tangkap ini dilaksanakan hampir seluruh wilayah pesisir kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mekanisme penyerahan bantuan hibah melalui kelompok-kelompok nelayan yang telah ada dan telah terdata pada dinas perikanan. Kelompok nelayan ini terdiri dari pengurus kelompok dan anggota kelompok dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok. Kelompok nelayan dibentuk dengan syarat yaitu; (1) anggota kelompok adalah nelayan dan minimal berjumlah 10 (sepuluh) orang; (2) dikukuhkan oleh kepala desa; (3) memiliki SKTK (surat keterangan terdaftar kelompok).

Masyarakat di kabupaten Kepulauan Mentawai dan khususnya desa Goisooinan memiliki mata pencaharian pada umumnya berasal dari sektor agraris atau bidang pertanian yaitu bertani dan menjadi nelayan. Bertani, berladang dan melaut menjadi mata pencarian yang utama bagi masyarakat yang tinggal di desa ini. Uraian di atas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini difokuskan kepada upaya menggali

informasi tentang pengembangan ekonomi masyarakat nelayan melalui program pengembangan perikanan tangkap.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam kajian tentang permasalahan pelaksanaan program pengembangan perikanan tangkap dalam pengembangan ekonomi nelayan di desa Gosiooinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai digunakan teori strukturasi oleh Anthony Giddens yang mengatakan inti dari teori strukturasi adalah konsep-konsep berupa struktur, sistem dan dualitas struktur yang menjelaskan hubungan antara agen (pelaku, aktor) dan struktur (Giddens, 2016:25).

Penelitian ini mengaitkan antara program pengembangan perikanan tangkap dengan teori strukturasi yang dijelaskan oleh Giddens tersebut. Program ini tidak dijalankan oleh struktur sendiri tetapi agen mempunyai peran untuk menjalankannya. Agen dalam penulisan ini merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program pengembangan perikanan tangkap. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat kelompok nelayan.

Masyarakat di Goisoooinan mempunyai latar belakang profesi petani yang memiliki lahan dan nelayan yang hanya memiliki sampan, alat tangkap berupa pancing dan jala atau sering disebut nelayan tradisional. Dalam pelaksanaan teknis kegiatan program perikanan tangkap, anggota kelompok nelayan yang telah dibantu dengan mesin boat 5 pk diharapkan bisa meningkatkan produktivitasnya dalam menangkap ikan, tetapi mereka masih cenderung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sama dengan sebelum program perikanan tangkap ini dilaksanakan.

Ada kemungkinan karena mereka adalah nelayan *subsisten* sehingga mereka hanya berkeinginan dan berorientasi untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari saja meskipun dengan adanya program perikanan tangkap yang berusaha mendorong perkembangan ekonomi nelayan supaya mereka bisa meningkatkan pendapatan keluarga serta menyisihkan pendapatan dalam bentuk tabungan. Kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program perikanan tangkap ini diharapkan mereka bisa termotivasi untuk lebih meningkatkan hasil tangkapannya semaksimal mungkin. Selain sebagai nelayan, anggota kelompok nelayan juga memiliki mata pencaharian lain sebagai petani karena rata-rata memiliki lahan perladangan. Bisa dikatakan mereka ini nelayan sambilan utama atau nelayan sambilan tambahan. Pemanfaatan program perikanan tangkap melalui bantuan mesin motor perahu, anggota kelompok nelayan cenderung bersikap hanya untuk menerima bantuan saja dan tanpa adanya tanggungjawab untuk mempergunakan fasilitas yang diberikan untuk peningkatan hasil tangkapan ikan di laut. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk meneliti apa saja permasalahan pelaksanaan program pengembangan perikanan tangkap dalam pengembangan ekonomi nelayan yang ada di desa Gosooinan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berusaha untuk mengungkap fenomena yang terjadi di dalam suatu struktur sosial tanpa melakukan pengukuran melalui angka-angka. Adapun informan ditetapkan dalam penelitian ini antara lain: nelayan yang ada di Gosooinan sebanyak 13 orang, tokoh masyarakat sebanyak 1 orang, aparat desa yaitu kepala desa Gosooinan, dan seorang Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala Seksi pada Dinas Perikanan. Penelitian ini menggunakan data data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara mendalam.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **1. Pendistribusian Bantuan Hibah**

Pendistribusian bantuan hibah ini dilakukan setelah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Pertama, pengajuan proposal bantuan. Program pengembangan perikanan tangkap ini memberikan bantuan kepada nelayan dalam kegiatan pengadaan armada penangkapan ikan berupa pengadaan mesin motor 5 pk. Bantuan yang diberikan kepada nelayan ini adalah bantuan hibah sehingga pemberian bantuan hibah ini harus mempedomani peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial. Pengajuan proposal bantuan hibah perikanan tangkap ini tidak dapat diajukan oleh perorangan tetapi kelompok nelayan yang telah ada dan ditandatangani oleh ketua kelompok nelayan.

Dari hasil penelitian diperoleh kelompok nelayan baru terbentuk setelah nelayan yang ada di Desa Goisoinan mendengar informasi tentang adanya bantuan hibah berupa mesin motor 5 pk. Sebelum anggota kelompok nelayan mendapatkan bantuan perikanan tangkap ini hampir semua mereka memenuhi kebutuhan hidup selain menjadi nelayan, mereka juga bertani, berladang, dan bekerja di proyek-proyek pembangunan jalan desa.

Kedua, tahap identifikasi dan verifikasi. Tahap identifikasi dan verifikasi dilakukan oleh Dinas Perikanan setelah ada persetujuan dari Bupati. Identifikasi dan verifikasi yang dimaksud adalah keanggotaan kelompok nelayan, aset yang telah dimiliki oleh anggota kelompok nelayan dan keaktifan nelayan ke laut. Saat identifikasi, aset seperti seharusnya telah ada karena bantuan mesin motor 5 pk tidak akan diberikan jika nelayan di Desa Goisoinan tidak mempunyai sampan.

Ketiga, tahap penetapan penerima bantuan. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi, Dinas Perikanan membuat laporan hasil verifikasi dan mengajukan rekomendasi ke Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah. Berdasarkan keputusan Bupati

Kepulauan Mentawai Nomor 282 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 400 Tahun 2016 ditetapkan kelompok nelayan penerima hibah sarana penangkapan di kabupaten Kepulauan Mentawai berupa mesin motor 5 pk dan salah satunya kelompok nelayan di Desa Goisooinan.

Keempat, tahap penyerahan bantuan. Setelah adanya penetapan penerima bantuan hibah oleh Bupati maka dilakukan penyerahan bantuan hibah tersebut langsung kepada kelompok nelayan. Bantuan hibah yang diberikan berupa mesin motor 5 pk sebanyak 34 unit yang diserahkan kepada tiga kelompok nelayan yaitu kelompok Surak Sita, Rop Ake dan Ron Ake.

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa hasil pendistribusian mesin motor 5 pk ini kurang mengenai sasaran karena nelayan yang sudah punya mesin motor masih tetap menerima bantuan tersebut dan ini tidak sesuai dengan yang disampaikan dari Dinas perikanan bahwa hasil identifikasi tidak boleh nelayan yang telah memiliki mesin motor mendapatkan bantuan mesin motor. Pendistribusian yang dilakukan seharusnya kepada kepada kelompok nelayan yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya hanya melaut sementara pada umumnya nelayan yang menerima bantuan ini bergabung dalam kelompok nelayan karena mendengar ada informasi tentang bantuan hibah dan syarat penerima bantuan harus bergabung dalam satu kelompok. Hal ini dapat mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi nelayan.

## **2. Pemanfaatan Bantuan Hibah**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, pada dasarnya pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan perikanan tangkap berupa mesin motor 5 pk masih jauh dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam surat perjanjian hibah anggota kelompok nelayan telah setuju bahwa bantuan mesin motor 5 pk ini jelas peruntukannya (untuk mencari ikan) dan tidak boleh disalahgunakan. Dalam pelaksanaan di

lapangan diperoleh data penggunaan mesin motor 5 pk adalah sebagai berikut untuk mengangkut pasir dan pergi ke ladang. Ketika bantuan mesin motor tersebut diterima pada awalnya dipergunakan untuk mencari ikan di laut, tetapi selanjutnya dipergunakan untuk keperluan lain seperti mengangkut pasir untuk membangun rumah dan keperluan proyek.

Berdasarkan data yang di lapangan, ditemukan pemanfaatan mesin motor ini yang kurang maksimal dengan beberapa alasan sehingga pemenuhan kebutuhannya pun kurang maksimal. Selain hasil tangkapan nelayan yang tidak menunjukkan peningkatan yang besar, frekuensi anggota kelompok nelayan pergi ke laut pun cenderung tidak bertambah setelah mereka mendapatkan bantuan mesin motor 5 pk ini. Hasil tangkapan dan frekuensi melaut nelayan tidak pasti karena mereka tidak rutin pergi melaut. Berdasarkan laporan perkembangan nelayan dari dinas Perikanan diperoleh rata-rata frekuensi nelayan di Goisooinan ke laut sebanyak 5 kali sebulan. Sebelum menggunakan mesin motor, berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan hasil tangkapan ikan rata-rata 3 kg sekali melaut. Hasil tangkapan ini ada yang dijual tetapi lebih sering digunakan untuk konsumsi sehari-hari karena jumlahnya sedikit. Rata-rata penghasilan mereka dalam sebulan berkisar Rp. 400.000. Sedangkan setelah menggunakan mesin motor 5 pk untuk menangkap ikan, jika dilihat dari hasil tangkapan nelayan sekali melaut antara 7 kg sampai 15 kg dan frekuensi melaut 5 kali sebulan, pendapatan nelayan di Desa Goisooinan dalam sebulan rata-rata dapat berkisar kurang dari satu juta rupiah sampai Rp. 1.000.000.

Masyarakat Desa Goisooinan memiliki struktur ekonomi yang agraris. Meskipun pada umumnya tinggal di pesisir pantai, tetapi aktivitas pekerjaan penduduk Goisooinan lebih banyak terkonsentrasi pada pengolahan sumber daya alam yaitu pertanian. Penduduk Desa Goisooinan memiliki beragam jenis pekerjaan utama sebagai mata

pencaharian. Proporsi terbesar adalah penduduk yang bekerja di bidang pertanian (petani) yang mencapai 65,6 persen, sedangkan yang bekerja sebagai nelayan mencapai 11 persen. Aktivitas nelayan pada umumnya adalah pekerjaan tambahan dan masih bersifat subsisten, yaitu hanya untuk konsumsi atau pemenuhan kebutuhan lauk pauk keluarga. Aktivitas masyarakat sebagai nelayan dijadikan sebagai sampingan menyebabkan peningkatan ekonomi bidang kenelayanan pun hanya sekedar untuk menambah pemenuhan kebutuhan saja dan hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh LIPI (Nawawi dan Wahyono, 2006). Berdasarkan penelitian ditemukan di lapangan bahwa seluruh nelayan yang ada di Desa Goisooinan, memiliki mata pencaharian lain yaitu sebagai petani.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan terhadap pemanfaatan mesin motor tersebut menyebabkan mereka tidak memanfaatkan untuk melaut secara maksimal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Koentjaraningrat (1969) bahwa manusia memiliki ciri-ciri mental yang negatif yaitu sikap tak bertanggungjawab dalam pekerjaan karena beorientasi pada adanya pengawasan dan norma-norma. Mereka akan bertanggungjawab dan melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada mereka apabila ada pengawasan yang dilakukan kepada mereka. Kurangnya tanggungjawab mereka dapat dilihat dari pemanfaatan bantuan mesin motor yang tidak hanya digunakan untuk melaut tetapi juga digunakan untuk keperluan lain dan mereka tidak pernah mendapat teguran atau sanksi dari Dinas Perikanan.

Agen nelayan melihat peluang yang ditimbulkan karena lemahnya pengawasan dari agen Dinas Perikanan. Ketika agen nelayan mencoba melanggar satu aturan yang telah ditetapkan dan tidak mendapat teguran dari Dinas Perikanan sebagai agen yang bertanggung jawab dalam pengawasan, agen nelayan merasa itu dapat terus dilakukan dan menjadi sesuatu yang rutin dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Rutinitas baru yang timbul adalah

agen nelayan pergi ke pulau seberang untuk mengambil pasir. Hampir semua nelayan yang diwawancarai memiliki rutinitas mengambil pasir dengan alasan lebih banyak menghasilkan uang. Dengan kesadaran diskursif, nelayan (agen) memanfaatkan tidak adanya pengawasan dan pendampingan (struktur) terhadap pemanfaatan mesin motor 5 pk untuk mencari sampingan atau uang tambahan dan menurut agen lebih besar daripada pergi melaut.

Kepulauan Mentawai juga mengalami musim badai atau musim pancaroba yang terjadi selama enam bulan yaitu antara bulan April–Oktober. Pada bulan-bulan tersebut daerah kepulauan Mentawai keadaan cuaca seringkali tidak bersahabat dan banyak terjadi badai kencang yang disertai hujan lebat. Hal ini juga yang sangat mempengaruhi nelayan untuk pergi melaut. Jika cuaca tidak bersahabat nelayan tidak akan pergi melaut. Untuk mengantisipasi keadaan yang seperti ini anggota kelompok nelayan mengandalkan hasil dari sawah maupun hasil kebun.

## **E. SIMPULAN**

Pelaksanaan pendistribusian bantuan mesin motor 5 pk dilakukan dengan menyerahkan kepada kelompok nelayan yang telah diverifikasi oleh dinas perikanan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2016 yang hanya mengatur tentang persyaratan administrasi pemberian hibah dan bantuan sosial. Hal ini menyebabkan pendistribusian bantuan tersebut kurang tepat sasaran karena yang menerima bukan sepenuhnya nelayan atau sering disebut nelayan sambilan dan ditemukan ada nelayan yang sudah memiliki mesin motor namun tetap mendapat bantuan mesin motor.

Pemanfaatan mesin motor 5 pk tidak sesuai dengan ketentuan karena sebagian besar anggota kelompok nelayan tidak hanya menggunakannya untuk mencari ikan ke laut tetapi juga digunakan untuk transportasi ke ladang dan mengangkut pasir atau material untuk proyek pembangunan jalan desa, bangunan dan pembangunan rumah karena masyarakat Desa Gooisooinan adalah masyarakat agraris yang memiliki profesi utama sebagai petani dan peladang, sedangkan nelayan adalah profesi sampingan tambahan atau sebagian kecil waktunya dipergunakan menangkap ikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agung, G., et.al. (2014). *Turuk Sikerei: Buku Seri Etnografi Kesehatan 2014*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Balitbangkes.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bandiyono, S & Antariksa. (2005). *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia Dusun Tuapejat, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora, Mentawai, Sumatera Barat*. Jakarta: LIPI.
- Charles. (2001). *Fishery Conflicts: A unified Framework Policy*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2006). *Definisi dan Klasifikasi Statistik Perikanan Tangkap*. Jakarta: Dirjen Perikanan Tangkap,
- Giddens, A. (2016). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5(1), Hal. 63-82*.
- Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka Tahun 2017, BPS dan Bappeda.
- Koentjaraningrat. (1969). *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Koentjaraningrat. (1971). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnadi. (2009). *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Martono, Nanang. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nawawi & Wahyono, A. (2006). *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia Desa Kuturai, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai, Sumatera Barat*. Jakarta: LIPI.
- Parwata, I. N. (2001). Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional. Studi Kasus di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung. *Program Pasca Sarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.
- Priyono & Herry, B. (2002). *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rohimah, I. (2002). Penerapan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat). *Program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Rudito, B. (1999). *Masyarakat dan Kebudayaan Suku Bangsa Mentawai*. Padang: Laboratorium Antropologi Unand.
- Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- Schefold R. & Persoon, G. (1985). *Pulau Siberut*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H., et al. (1997). *Pulau Siberut. Potensi, Kendala dan Tantangan Pembangunan*. Bogor: Surya.

Suwarsono & Alvin Y.S. (2000). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Suraryo, S. (2006). Program Bantuan Ternak Pada Keluarga Miskin di Kabupaten Magelang. *Program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.